RAKYAT KALBAR

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2018 | Hal.: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Sikapi Audit BPK, Pemkab Gelar RTL

SAMBAS-RK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit reguler terhadap laporan keuangan Pemkab Sambas Tahun Anggaran 2017. Audit yang berlangsung selama sebulan itu disikapi dengan Rapat Tindak Lanjut (RTL) seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sambas.

Sekretaris Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Sambas, Samekto Hadi Suseno menegaskan, pemeriksaan reguler yang dilakukan BPK merupakan hal yang wajar dan sesuai peraturan. "Pemeriksaan ini berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 297 menegaskan, bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan untuk diaudit oleh BPK," paparnya, Rabu (28/2).

Proses audit, kata Samekto, bisa berlangsung hingga sebulan. Pemeriksaan dilakukan secara berkala sekali dalam setahun. "Audit ini dilakukan secara reguler setahun sekali. BPK sudah melaksanakan audit sejak tanggal 12 Februari, selama satu bulan sampai 12 Maret mendatang," terangnya.

Pemeriksaan keuangan tersebut, tambah Samekto, merupakan pemeriksaan pendahuluan atau disebut pemeriksaan interim. Tujuan dilakukan RTL, kata Samekto, adalah untuk menindaklanjuti hasil sementara pemeriksaan atau audit dari BPK terhadap beberapa instansi di lingkungan Pemkab Sambas. "Jadi yang sudah dilakukan oleh BPK dalam dua pekan ini, diantaranya turun ke lapangan, mengecek uji fisik kegiatan-kegiatan pada tahun 2017. Kemudian, melihat kondisi administrasi untuk penyusunan laporan keuangan," paparnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, didapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan dan dilengkapi oleh OPD. "Beberapa laporan menyebutkan masih ada koreksi dari BPK. Misalnya, ternyata ada tahun yang belum tercatat. Kebanyakan dalam konteks pemeriksaan laporan keuangan, dan lebih cenderung kepada urusan administratif," jelasnya.

Kecuali, tegas Samekto, ditemukan adanya ketimpangan dan permasalahan di lapangan pada saat uji fisik. Misalnya bangunan jembatan, jalan dan segala macam yang dilakukan pengecekan oleh BPK. "Jika ternyata sudah betul, maka tidak ada masalah," pungkasnya.

Reporter: Sairi
Editor: Yuni Kurniyanto